

ANALISIS *TREND* DAN DAMPAK PENGIRIMAN TKI: KASUS DUA DESA DI LOMBOK TIMUR, NUSA TENGGARA BARAT*

Kurnia Novianti**

Abstract

Sending labor abroad is not a new phenomenon in Indonesia. Poverty and lack of jobs, particularly in village areas, are the main reason why sending labor abroad is always happened each year. East Lombok, West Nusa Tenggara, is one of good examples. Thousand of peoples go abroad as workers in some of blue collar and domestic areas. Most of them are uneducated and have no skills. They come to Malaysia as plantation workers or to Saudi Arabia as servants. This field of works put them in a disadvantage position. As reported by the media, Indonesian workers are always the victims of their employer treatment, such as unpaid working, physically or sexually abuse, or over hours working.

*This article examines the trend and the impacts of sending workers abroad from two villages in East Lombok, West Nusa Tenggara. As the research results, people in these villages go to Malaysia and Saudi Arabia to get higher income, to earn money to build a house and to fulfill their family needs. But there are some social and cultural impacts of this process, such as stigma of *jamal* (widow of a husband who went to Malaysia) and *durab* (widower of a wife who went to Saudi Arabia), and divorce rate. Based on this analysis, it is important for the Indonesian government to reconsider sending workers abroad is the only solution for the employment' problems.*

Keywords: Labor sending, trend, social and cultural impacts.

Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri bukanlah fenomena baru di Indonesia. Kemiskinan dan tidak tersedianya lapangan kerja, khususnya di pedesaan, menjadi alasan utama mengapa pengiriman tenaga kerja (tidak terdidik) ke luar negeri selalu meningkat setiap tahun. Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu contohnya. Ribuan orang pergi ke luar negeri sebagai tenaga kerja kasar di beberapa area domestik. Kebanyakan dari mereka tidak berpendidikan dan berkeahlian. Mereka datang ke Malaysia sebagai buruh perkebunan atau ke Arab Saudi sebagai pembantu rumah tangga. Sektor pekerjaan ini kerap kali menempatkan

* Penelitian lapangan dilakukan di Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasele dan Desa Labuan Lombok, Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, selama 15 hari (18 Mei-02 Juni 2009).

** Peneliti di Pusat Penelitian Sumberdaya Regional (PSDR), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

mereka pada posisi yang tidak menguntungkan. Sebagaimana dilaporkan dalam beberapa media bahwa tenaga kerja Indonesia banyak menjadi korban para majikannya, seperti upah yang tidak dibayar, kekerasan fisik atau pelecehan seksual, atau kelebihan beban kerja.

Artikel ini melihat dan menganalisis bagaimana tren dan dampak yang ditimbulkan dari pengiriman Tenaga Kerja Indonesia yang berasal dari 2 desa di Lombok Timur, NTB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan sebagian besar mereka yang bekerja di Malaysia dan Arab Saudi adalah untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi, membangun rumah dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Di sisi lain, muncul pencitraan/stigma jamal (janda Malaysia) dan durab (duda Arab) bagi istri/suami yang pasangannya menjadi TKI -selain tingginya tingkat perceraian- sebagai beberapa contoh dampak sosial dan budaya dari pengiriman TKI. Berdasarkan data tersebut, penulis menganalisis bagaimana tren pengiriman TKI di Desa Pengadangan dan Labuhan Lombok selama kurun waktu tertentu dan dampaknya terhadap dinamika kehidupan masyarakat. Selain itu, tulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan terutama bagi pemerintah daerah untuk lebih mengembangkan potensi yang dimiliki daripada menjadikan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri sebagai satu-satunya jalan keluar atas ketiadaan lapangan pekerjaan di daerah.

Kata Kunci: Pengiriman tenaga kerja, tren, dampak sosial dan budaya.

PENDAHULUAN

*Bukan lautan hanya kolam susu
Kail dan jala cukup menghidupimu
Tiada badai, tiada topan kau temui
Ikan dan udang menghampiri dirimu
Orang bilang tanah kita tanah surga
Tongkat, kayu dan batu jadi tanaman*
(syair lagu “Kolam Susu” karya Koes Plus)

Sebait lagu di atas menggambarkan betapa Indonesia begitu mengagumkan. Tanah yang subur dan laut yang luas senantiasa membawa kemakmuran bagi setiap anak negeri. Namun benarkah demikian? Apa yang terjadi dengan bangsa yang negerinya begitu subur tetapi mengadu nasib di negeri orang? Inilah kenyataan yang terjadi. Ketika banyak penelitian melaporkan bahwa jumlah orang yang dikirim ke luar negeri (untuk menjadi TKI) dalam kurun waktu 20 tahun terakhir mengalami peningkatan (Perwira 2001; Tjiptoherijanto dan Sonny Harry Harmadi 2008; The World Bank 2008; Tirtosudarmo 2009), pertanyaan yang muncul di benak kita adalah apakah ibu pertiwi sudah tidak sanggup lagi memberikan kehidupan kepada anak-anak negeri?

Tulisan ini akan mendeskripsikan dan menganalisis *trend* dan dampak dari fenomena pengiriman TKI dengan mengambil kasus dua desa di Kabupaten Lombok Timur. Kabupaten ini merupakan kantong TKI terbesar di Propinsi Nusa Tenggara Barat. Seperti disebutkan oleh I Komang Subadra, Kepala Balai Pelayanan Penempatan

dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Mataram bahwa dari 53.731 orang tenaga kerja yang ditempatkan selama tahun 2009 tercatat 19.843 orang di antaranya berasal dari kabupaten Lombok Timur (Lotim). Dengan demikian, kabupaten ini menjadi basis TKI terbesar dibandingkan 9 kabupaten lainnya di NTB (Widhya 2010).

MENGAPA MENJADI TKI? LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam banyak penelitian mengenai migrasi internasional disebutkan bahwa terjadinya migrasi internasional lebih didominasi oleh faktor ekonomi, dimana ditemukan ketimpangan antara pembangunan ekonomi di kawasan/negara maju dengan negara berkembang (Sudjana 2009; Jannes 2005; Mantra 1998; Munir 1988). Schuerkens (2005: 535-537) lebih lanjut mengatakan bahwa penjelasan ekonomi yang paling sederhana mengenai fenomena migrasi adalah keinginan individu untuk meningkatkan taraf hidupnya. Migrasi kemudian memberikan efek *convergence* yang terlihat apabila kita ingin membedakan antara dampak migrasi terhadap pembangunan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Migrasi berpengaruh terhadap tingkat upah pada wilayah-wilayah emigrasi dan imigrasi (negara pengirim dan penerima) dalam jangka waktu yang singkat hingga menengah. Migran yang mengirimkan uang (*remittance*) nya ke negara asal akan berpengaruh terhadap perekonomian di negara asal. Kontribusi migran terhadap keuangan dalam pelayanan publik di negara penerima akan berpengaruh terhadap transfer publik. Ketersediaan tenaga kerja ini lebih jauh dapat mengubah struktur produksi dan mungkin berpengaruh terhadap aspek perdagangan antara kedua negara yang bersangkutan.

Migrasi internasional juga dijelaskan secara sosiologis terjadi akibat meningkatnya populasi jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan terbukanya peluang kerja, sehingga menyebabkan banyaknya angkatan kerja produktif yang tidak mempunyai pekerjaan (*unemployment*). Meningkatnya jumlah angkatan kerja di satu sisi dan menyempitnya peluang kerja di sisi lain secara bersamaan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan orang melakukan migrasi. Dalam hal ini, faktor ekonomi dapat dikatakan sebagai salah satu faktor terjadinya migrasi (Mas'udah 2007).

Sementara dalam pandangan Schuerkens (2005: 535-537) migrasi internasional lebih didominasi oleh adanya ketimpangan antara pembangunan ekonomi di kawasan/negara yang lebih maju dibandingkan dengan negara berkembang. Ia lebih lanjut mengatakan bahwa penjelasan ekonomi yang paling sederhana mengenai fenomena migrasi adalah keinginan individu untuk meningkatkan taraf hidupnya. Migrasi kemudian memberikan efek *convergence* yang terlihat apabila kita ingin membedakan antara dampak migrasi terhadap pembangunan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Migrasi berpengaruh terhadap tingkat upah pada wilayah-wilayah emigrasi dan imigrasi (negara pengirim dan penerima) dalam jangka waktu yang singkat hingga menengah. Migran yang mengirimkan uang (*remittance*) nya ke negara asal akan berpengaruh

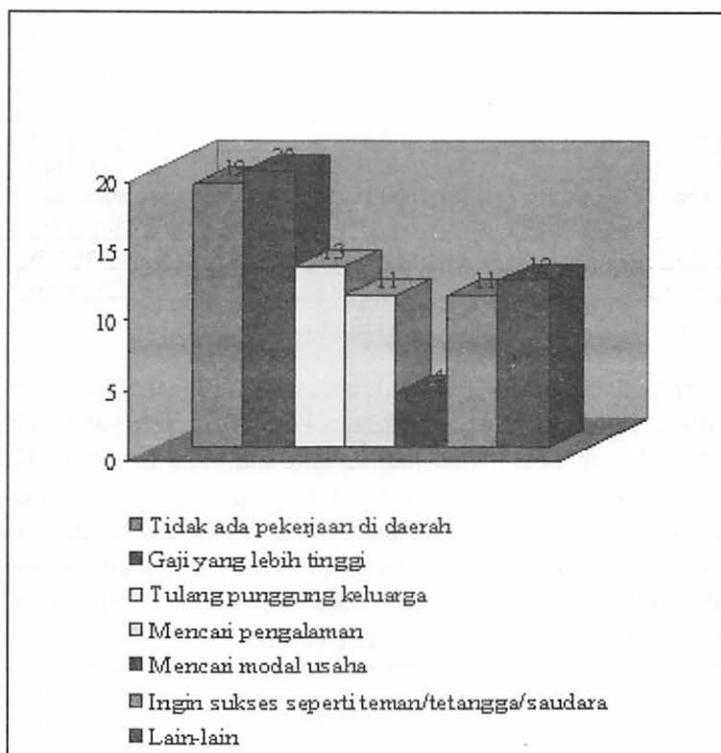
terhadap perekonomian di negara asal. Ketersediaan tenaga kerja ini juga dapat mengubah struktur produksi dan mungkin berpengaruh terhadap aspek perdagangan antara kedua negara yang bersangkutan.

Oleh karena itu, dalam pandangan *optimistic* dapat dikatakan bahwa migrasi tetap memberikan dampak positif, terutama dalam kemampuannya untuk mengompensasi ketidaksempurnaan pasar dan memungkinkan keluarga-keluarga¹ (terutama di negara-negara berkembang) untuk berpartisipasi dalam aktivitas produktif. Meskipun uang kiriman baru dimanfaatkan sebatas konsumsi langsung namun terjadi juga *multiplier effects* akibat meningkatnya permintaan akan barang dan jasa di daerah-daerah lokal. Selain itu, migrasi juga tidak memutuskan hubungan antara individu yang bermigrasi dengan anggota keluarga dan komunitasnya di daerah asal; sekaligus berhubungan dengan pihak-pihak yang mempekerjakannya di negara penerima. Ikatan ini melahirkan fenomena *chain migration*, sistem jarak jauh yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja dan organisasi yang mengelola uang kiriman di daerah asal. Pada tahap akhir, ikatan tersebut juga menjadi faktor kunci dalam konsolidasi organisasi-organisasi transnasional yang mendorong migran untuk lebih menyuarakan aspirasinya di lembaga-lembaga daerah bahkan di tingkat negara (Guarnizo, Portes, and Haller 2003; Goldring 2002 dalam Portes 2007: 77).

Sementara dalam kasus TKI asal Lombok, tidak semua orang yang berangkat ke luar negeri disebabkan tidak adanya pekerjaan di daerah asal. Dari data berikut ditunjukkan bahwa keinginan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar menjadi faktor pendorong terbesar seseorang untuk bekerja di luar negeri. Sementara alasan-alasan lain yang mengikuti adalah tidak adanya pekerjaan, menjadi tulang punggung keluarga, mencari pengalaman dan ingin berhasil seperti teman/kerabat/tetangga. Sementara alasan untuk mencari modal untuk membangun usaha di daerah asal menjadi faktor pendorong terkecil seseorang bekerja di luar negeri.

Hal tersebut telah pula dibuktikan oleh Mantra (1998: 11) yang dalam penelitiannya menemukan bahwa salah satu alasan begitu tingginya minat orang Indonesia untuk menjadi TKI di luar negeri, terutama Malaysia adalah tawaran upah yang lebih tinggi dibandingkan di tanah air, untuk jenis pekerjaan yang sama. Lebih lanjut, ia membandingkan antara upah yang diberikan di Indonesia dan Malaysia untuk jenis-jenis pekerjaan di sektor-sektor pertambangan, perkebunan dan konstruksi. Ia

¹ Keluarga/*household* bisa bersifat inti/*nuclear* atau gabungan/*joint* (orang tua dengan anak yang telah menikah hidup bersama). Dalam sebuah pernikahan (keluarga) dikenal istilah *conjugal money*, yaitu uang yang dimiliki pasangan menikah yang menjadi faktor terpenting dalam lingkup domestik. Batas-batas yang terlihat ditunjukkan oleh tabungan bersama dalam pernikahan, kepemilikan rumah bersama dan privasi keuangan. Aliran uang yang digunakan di luar oleh anak-anak yang telah dewasa dan orang tua dapat dibandingkan, kecuali untuk penggunaan-penggunaan yang tidak rutin/biasa (Singh 1997 dalam Singh 2006: 381).



Grafik 1. Motivasi menjadi buruh Migran di Luar Negeri

Sumber: Penelitian Lapangan. Data diolah, 2009.

mengatakan bahwa disamping kondisi yang miskin sumberdaya alam, upah yang ditawarkan di tanah air sangat rendah. Sementara Malaysia di sisi lain, menyediakan lapangan pekerjaan yang sangat luas di sektor-sektor tadi. Selain itu, upah yang ditawarkan sangat menarik karena mereka berani membayar beberapa kali lipat untuk jenis pekerjaan sama yang dilakukan di tanah air. Inilah salah satu faktor yang menyebabkan banyaknya tenaga kerja Indonesia yang lebih memilih untuk menjadi TKI ketimbang bekerja di dalam negeri. Sebagai ilustrasi, tabel berikut menggambarkan perbandingan antara upah yang ditawarkan Indonesia dan Malaysia:

Sedangkan upah yang diterima pekerja informal (pembantu rumah tangga) asal Indonesia yang bekerja di Malaysia berkisar antara 400–500 ringgit per bulan. Ini setara dengan Rp1.080.000–Rp1.350.000. Secara umum, jumlah ini tetap lebih besar bila dibandingkan dengan upah di tanah air. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia tetap akan mendesak Malaysia untuk memberikan standar gaji pembantu yang lebih

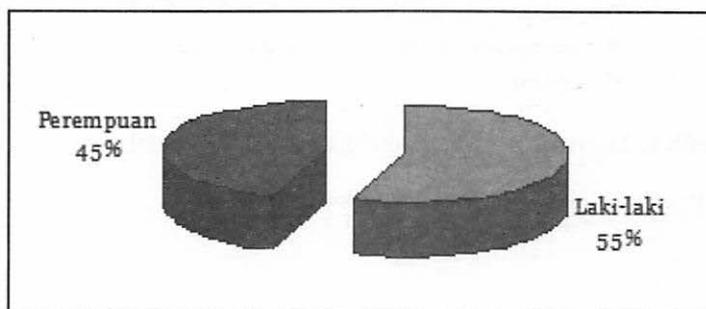
Tabel 1. Perbandingan antara Upah yang Diterima Pekerja di Indonesia dan Malaysia

Tahun	Daerah Asal	Tingkat Upah Lokal (Indonesia)	Tingkat Upah di Malaysia	Perbandingan dalam Persentase
1982	Bawean	Rp. 500/Hari	Rp. 9000/Hari	1800
1984	Jawa Timur	Rp. 3000/Hari	Rp. 9000/Hari	300
1990	Lombok	Rp. 500-Rp. 1000/Hari	Rp. 7000 - Rp. 8000/Hari (Perkebunan)	8000
1990	Indonesia	Rp. 1000/Hari	Rp. 10,000/Hari	1000
1991	Semarang	Rp. 2500/Hari	Rp. 10,800/Hari (Sarawak)	432

Sumber: Mantra (1998: 11-12) mengolah dari Hugo (1993).

tinggi dari yang berlaku saat ini, minimal sebesar Rp. 2,3 juta per bulan atau setara 800 ringgit Malaysia.² Hal ini dilakukan mengingat beban pekerjaan yang harus ditanggung.

Sementara itu secara statistik, jumlah laki-laki yang menjadi TKI masih lebih banyak dibandingkan perempuan. Dari 50 orang responden di Desa Pengadangan dan Labuan Lombok (Lombok Timur), terdapat 55% laki-laki yang berangkat ke luar negeri untuk mengadu nasib sementara jumlah perempuan hanya 45%. Hal ini juga dipengaruhi oleh nilai budaya dalam masyarakat bahwa laki-laki adalah tulang punggung keluarga dan berkewajiban mencari nafkah di luar rumah³.



Grafik 2. Jenis Kelamin TKI di Desa Pengadangan dan Labuan Lombok yang Berangkat ke Luar Negeri

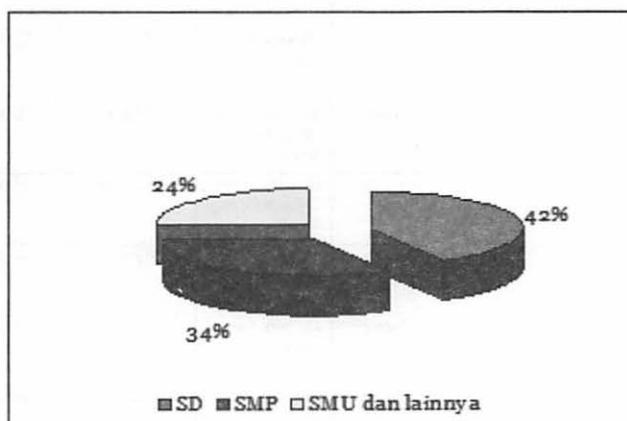
Sumber: Penelitian Lapangan. Data diolah, 2009.

² Dalam <http://www.antaraneews.com/berita/1251995285/indonesia-desak-malaysia-naikkan-gaji-tki>. Diakses tanggal 4 Februari 2010.

³ Fenomena ini juga ditemukan Munir (1988: 51) dalam penelitiannya mengenai buruh migran yang berasal dari 3 kabupaten di Nusa Tenggara Timur, yaitu Kabupaten Flores Timur, Sikka dan Ende. Ia mencatat bahwa dari kelompok yang berpindah ternyata kebanyakan dilakukan oleh penduduk laki-laki yang umumnya menjadi kepala rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap kehidupan keluarganya. Meskipun sebagaimana dampak negatif yang juga dialami oleh NTB, dengan bertambahnya jumlah laki-laki yang pergi menjadi buruh migran ke luar negeri mengakibatkan berkurangnya tenaga laki-laki di pertanian sehingga kekosongan tersebut diisi oleh wanita dan anak-anak.

Namun pada kasus-kasus tertentu, peneliti juga menemukan bahwa perempuan-perempuan yang menjadi TKI juga diposisikan sebagai tulang punggung keluarga karena tidak lagi bersuami (menjadi orang tua tunggal bagi anak-anaknya) atau tidak ada lagi anggota keluarga yang diandalkan untuk bekerja. Seperti wawancara dengan Ibu Masrullah⁴ (55 tahun) yang pernah menjadi pembantu rumah tangga di Malaysia dan Arab Saudi. Ia mengungkapkan alasan utamanya menjadi TKW adalah ekonomi karena dua dari keenam anaknya masih sekolah (SMU dan SMP). Semenjak ditinggal suaminya, Bu Masrullah harus bekerja seorang diri untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Namun baginya, menjadi TKW tidak lagi dapat menjadi andalan mengingat usianya yang sudah lagi muda. Kini, Bu Masrullah lebih mengandalkan keahliannya menjahit pakaian sebagai mata pencahariannya setelah tidak lagi menjadi TKI.

Kembali pada karakteristik TKI asal NTB, Bank Indonesia (2008) mencatat bahwa sebagian besar TKI yang dikirimkan ke luar negeri hanya berhasil menamatkan sekolah dasar (42%) dan sekolah menengah pertama (34%). Sedangkan tamatan sekolah menengah umum atau tingkatan yang lebih dari itu hanya 24%, seperti digambarkan berikut ini. Survey ini menunjukkan bahwa level pendidikan para pekerja Indonesia masih sangat rendah. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila sebagian besar TKI hanya mampu mengisi sektor informal di dalam pasar tenaga kerja luar negeri.



Grafik 3. Tingkat Pendidikan TKI Asal NTB Berdasarkan Data Bank Indonesia, 2008

Sumber: Hasil Survei Nasional TKI di Nusa Tenggara Barat. www.bi.go.id/NR/rdonlyres/A2EC7FBB/Boks1SurveiTKI.pdf. Diakses tanggal 3 Februari 2010.

⁴ Ibu Masrullah adalah satu dari sebagian kecil orang yang tidak lagi mengandalkan mencari uang di luar negeri sebagai TKI setelah pergi satu atau dua kali. Namun keputusan tersebut berbeda-beda setiap individu, tergantung banya faktor yang mempengaruhinya.

Bagi Desa Pengadangan dan Labuan Lombok khususnya, dan desa-desa lain di Lombok Timur pada umumnya, pengiriman penduduk sebagai TKI bukanlah fenomena baru. Sejak tahun 1990 hingga 2008 tercatat bahwa jumlah TKI yang berangkat selalu mengalami peningkatan setiap periodenya. Data berikut menunjukkan bahwa menjadi TKI di luar negeri masih dianggap sebagai alternatif untuk mencari pekerjaan yang lebih baik daripada bekerja di desa asalnya.

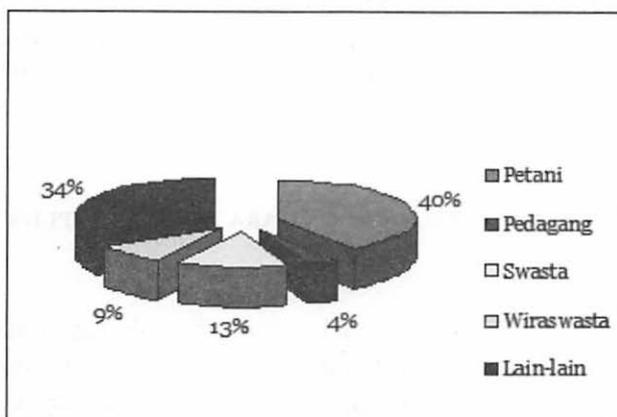
Tabel 2. Data Penduduk Desa Pengadangan yang Pergi ke Luar Negeri Berdasarkan Jenis Kelamin dan Negara Tujuan (1990-2008)

Nama Dusun	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin		Jumlah TKI yang Berangkat		Negara Tujuan	Jumlah TKI (Selama 1990-2008)	Jumlah Keberangkatan Dilihat dari Negara Tujuan (Berdasarkan Kawasan)	
	Pria	Wanita	1990-2004	2005-2008			Asia Tenggara	Asia Tengah
Timuk Lauk	140 orang	7 orang	21 orang	126 orang	Malaysia, Brunei Darussalam, Arab Saudi	147 orang	144 orang	3 orang
Bawek Paok	88 orang	15 orang	10 orang	93 orang	Malaysia, Arab Saudi	103 orang	96 orang	7 orang
Gubuk Jero	64 orang	2 orang	3 orang	63 orang	Malaysia	66 orang	66 orang	-
Semodek	68 orang	5 orang	5 orang	68 orang	Malaysia, Arab Saudi	73 orang	72 orang	1 orang
Kawisawi	188 orang	49 orang	27 orang	210 orang	Malaysia, Brunei Darussalam, Arab Saudi	237 orang	223 orang	14 orang
Tibu Petung	133 orang	24 orang	7 orang	140 orang	Malaysia, Brunei Darussalam, Arab Saudi	147 orang	136 orang	11 orang
Timbanuh	136 orang	16 orang	35 orang	117 orang	Malaysia, Brunei Darussalam, Arab Saudi	152 orang	144 orang	8 orang
Sukatain	117 orang	15 orang	15 orang	117 orang	Malaysia, Arab Saudi	132 orang	123 orang	9 orang
TOTAL	934 orang	123 orang	123 orang	934 orang		1.057 orang	1.004 orang	53 orang

Sumber: Advokasi TKI Indonesia (AD BMI)⁵ 2008.

Sebagaimana telah digambarkan sebelumnya, TKI asal Lombok bekerja di luar negeri lebih karena ingin memperoleh penghasilan yang lebih besar. Untuk itu, peneliti mewawancarai seorang TKI yang masih muda bernama Rudi (20 tahun). Sebagai seorang yang masih berusia produktif, ia sangat menyadari bahwa sangat sulit mengandalkan pertanian sebagai sumber mata pencaharian, apalagi hanya sebagai buruh musiman. Penghasilan yang diperolehnya dari bertani dirasakan tidak mencukupi kebutuhan keluarganya, terlebih lagi kondisi orang tuanya yang sudah tidak kuat lagi

bekerja. Hal ini membuktikan bahwa pertanian di pedesaan tidak cukup menahan generasi muda pedesaan untuk tetap tinggal dan membangun desa. Dari 50 kuesioner yang juga disebarakan kepada informan (TKI dan keluarganya) diperoleh hasil bahwa sebagian besar TKI yang berangkat ke luar negeri bermata pencaharian sebagai petani di desanya. Meskipun menjadi petani dapat pula berarti sebagai buruh tani (bukan pemilik lahan).



Grafik 4. Pekerjaan di Daerah Asal Sebelum Menjadi TKI di Luar Negeri

Sumber: Penelitian Lapangan. Data diolah, 2009.

Sebanyak 40% orang yang kemudian memilih menjadi TKI sebelumnya adalah petani. Sedangkan yang lain (sebesar 34%) adalah pedagang, diikuti oleh pekerja swasta (13%) dan wiraswasta (9%). Berdasarkan angka-angka tersebut, muncul sebuah keprihatinan bahwa ternyata Indonesia yang dikenal sebagai negara kaya akan sumber daya alam (termasuk pernah menjadi lumbung padi di Asia Tenggara), tidak mampu menjadikan sektor pertanian sebagai andalan bagi masyarakat di pedesaan dan terbukti kalah bersaing dengan tawaran pekerjaan sebagai TKI di negeri tetangga.

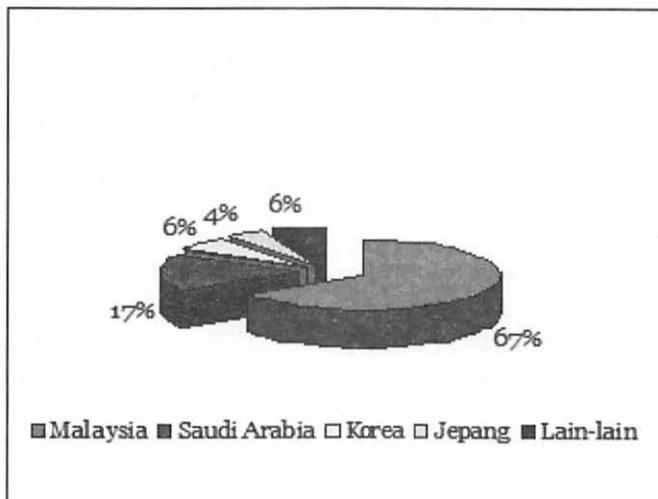
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sahrudin (36 tahun), seorang aktivis NGO (Ad BMI) yang melakukan aktivitas pendampingan TKI di desanya terungkap bahwa sebagian besar petani di desanya merupakan petani pekerja dan bukan pemilik lahan. Berdasarkan pengalamannya pula, ia mengaku bahwa ayahnya juga salah seorang petani penggarap karena tidak memiliki lahan sendiri sehingga ia tidak memilih

⁵ AD BMI adalah salah satu organisasi independen (NGO) di Lombok Timur yang fokus pada pengembangan dan pemberdayaan para buruh migran di Lombok Timur. Kegiatan yang dilakukan oleh organisasi ini antara lain yaitu memfasilitasi dan melakukan pendampingan buruh migran asal Lombok Timur. Dengan jaringan yang luas, organisasi ini juga memantau perkembangan buruh migran di pulau Lombok, NTB, termasuk menumbuhkan kesadaran/*awareness* terhadap para mantan buruh migran untuk lebih memberdayakan diri dan mengembangkan daerah asal (tidak kembali menjadi buruh migran).

meneruskan pekerjaan ayahnya sebagai petani penggarap karena hasil (pendapatannya) tidak menjanjikan. Pengamatan yang dilakukan penulis selama melakukan penelitian juga menunjukkan bahwa faktor pendorong yang cukup kuat seorang pemuda untuk pergi dari desanya (untuk menjadi TKI) adalah kenginannya untuk mendapatkan uang yang lebih besar. Menjadi petani di desa bukanlah pilihan yang strategis baginya. Paparan ini memiliki kemiripan dengan hasil penelitian Hamzah (2000) di Desa Jago, Lombok Tengah. Berdasarkan hasil penelitiannya, keengganan kaum muda untuk bekerja di desanya sebagai petani merupakan faktor yang ikut berpengaruh pada tingginya kemauan untuk bekerja sebagai buruh di luar negeri (Tirtosudarmo 2008: 6-7).

NEGARA TUJUAN YANG MENJADI PILIHAN DAN CARA YANG DITEMPUH UNTUK MENJADI TKI

Dari beberapa negara di kawasan Asia Tenggara, Tengah dan Timur, Malaysia masih menjadi idola bagi para TKI asal Lombok, terutama Lombok Timur. Gambar berikut menunjukkan bahwa Malaysia adalah negara yang paling banyak dipilih TKI sebagai tujuan bekerja (67%). Terlepas dari berbagai kasus yang menimpa TKI asal Indonesia di Malaysia, negara tersebut masih tetap menjanjikan bagi TKI asal Lombok. Sementara negara-negara lainnya seperti Arab Saudi hanya menempati posisi kedua (17%) sebagai negara tujuan. Sedangkan Korea dan Jepang mengikuti dengan prosentase sebesar 6% dan 4%.



Grafik 5. Negara yang Pernah dan (atau) Menjadi Tujuan Bekerja

Sumber: Penelitian Lapangan. Data diolah, 2009.

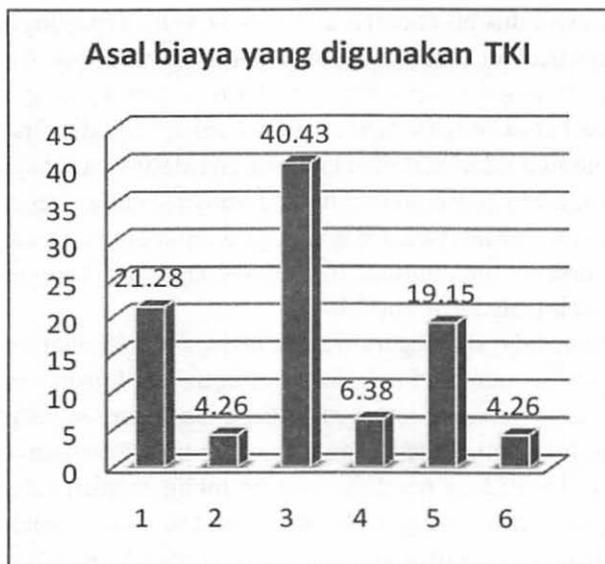
Pemilihan ini bukan tanpa alasan. Hasil wawancara dengan Bapak Mulyani (50 tahun) sebagai salah satu mantan TKI yang pernah bekerja di Malaysia mengungkapkan bahwa Malaysia adalah negara yang tidak banyak meminta persyaratan, termasuk pendidikan dan keahlian. Senada dengan hal tersebut, Bapak Ahmin (45 tahun) juga mengungkapkan bahwa untuk bisa bekerja di Malaysia, yang terpenting adalah keinginan untuk bekerja. Berdasarkan pengalamannya pertama kali, Pak Ahmin datang ke Malaysia dengan cara ilegal karena masa itu baru ia dan 4 orang kawannya yang pergi ke Malaysia dari desa Pengadangan. Setiba di sana, ia ditawarkan pekerjaan sebagai buruh perkebunan namun tidak bertahan lama karena statusnya sebagai migran ilegal membuatnya memutuskan untuk kembali ke desanya. Namun secara umum dapat dikatakan bahwa memilih Malaysia sebagai negara tujuan bekerja sangat masuk akal mengingat negara tersebut membutuhkan tenaga-tenaga (asal Indonesia) yang dapat dipekerjakan di perkebunan dan domestik.

Berbeda dengan Malaysia, negara-negara maju seperti Korea dan Jepang hanya menerima TKI yang memenuhi kualifikasi tertentu. Di Jepang, misalnya, hanya membutuhkan TKI yang memiliki ketrampilan/keahlian khusus seperti perawat. Begitu juga dengan Korea, meskipun masih menerima TKI untuk memenuhi kebutuhan di sektor industri tetapi kualifikasi pendidikan tetap menjadi salah satu prasyarat yang penting. Dari hasil wawancara dengan Bapak Harun (35 tahun), salah seorang warga desa yang pernah bekerja di Korea sebagai buruh pertambangan, terungkap bahwa Korea menetapkan minimal tingkat pendidikan yang harus dimiliki calon pekerja adalah setingkat SMU. Menurutnya hal itulah yang menyebabkan tidak banyak orang dari desanya berminat untuk bekerja di sana. Ditambah lagi dengan biaya pemberangkatan yang jauh lebih besar dibandingkan ke Malaysia atau Arab Saudi.

Seperti telah disebutkan bahwa untuk bisa bekerja ke luar negeri, calon TKI harus mengeluarkan biaya yang bisa dikatakan tidak sedikit. Beberapa wawancara dilakukan terhadap anggota keluarga TKI, TKI sendiri dan *taikong/tekong*⁶ untuk memperoleh data mengenai jumlah uang yang harus dikeluarkan. Menurut hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa sekitar tahun 2000, seorang calon TKI yang akan bekerja di Malaysia rata-rata harus mengeluarkan sekitar Rp. 3,5 juta untuk membayar ongkos tiket, pembuatan dokumen dan *fee* petugas lapangan/*tekong*. Dapat dibayangkan begitu besar nominal yang harus dikeluarkan sebelum menjadi TKI. Namun menurut Bapak Ori (35 tahun) yang pernah menjadi *tekong* selama hampir 12 tahun (sejak 1994-2005), ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh calon TKI untuk mendapatkan uang, diantaranya dengan menggadaikan sapi atau sawah (bila memiliki), menjual barang-barang berharga atau meminjam darinya. Uang itu dikembalikan melalui keluarganya setelah uang kiriman pertama datang.

Dengan demikian, sebagian besar calon TKI memperoleh dana dari pinjaman yang bersumber dari pihak lain. Data statistik menunjukkan bahwa 40,43% TKI memperoleh pinjaman dari keluarga/kerabat, tetangga atau teman/kenalan. Pihak-pihak inilah yang bisa diandalkan sebagai tempat meminjam karena paling dekat. Ada pula yang meminjam dari rentenir/bank keliling meskipun mengetahui bahwa hal itu beresiko

karena jeratan bunga yang tinggi. Namun kemudahan yang ditawarkan para rentenir/bank keliling membuat calon TKI lebih memilih meminjam lewat mereka dibanding bank resmi yang mensyaratkan beberapa hal.



Grafik 6. Biaya yang Digunakan untuk Berangkat ke Luar Negeri

Keterangan:

1. Tabungan
2. Menjual kekayaan (sawah, emas, motor dll)
3. Pinjaman dari keluarga, tetangga, teman, bank resmi, rentenir/bank keliling
4. Agen TKI
5. Pemotongan gaji
6. Lain-lain

Sumber: Penelitian Lapangan. Data diolah, 2009.

Sementara itu, tabungan menjadi sumber pembiayaan kedua bagi sebagian calon TKI. Sebesar 21,28% responden mengaku menggunakan tabungannya untuk membiayai keberangkatan diri atau anggota keluarganya ke luar negeri. Sementara

⁶ Sebutan untuk penyalur tenaga kerja/buruh migran ke luar negeri. Seorang *tekong* biasanya adalah seseorang yang memiliki status tertentu di masyarakat sehingga dipercaya, apalagi *tekong* tersebut telah berpengalaman dan memiliki *track record* yang baik dalam mengirim dan menempatkan TKI di negara tujuan.

19,15% responden memperoleh uang dari pemotongan gaji di tempat ia bekerja sebelumnya. Selain itu, agen (PJTKI/PPTKIS sekarang) juga dapat diandalkan untuk tempat meminjam (6,38%) dan hanya sebagian kecil responden (4,26%) yang menggunakan harta kekayaannya untuk dijual. Dari data tersebut terlihat bahwa seseorang yang akan berangkat ke luar negeri memiliki harapan yang sangat besar karena telah mengeluarkan biaya yang cukup besar sebelum ia berangkat. Beberapa informan mengatakan bahwa paling tidak, dalam satu atau dua tahun pertama ia bekerja, ia harus mampu membayar lunas semua utang-utangnya. Terlebih lagi utang kepada rentenir/bank keliling yang biasanya meminta bunga cukup tinggi sehingga untuk satu atau dua tahun pertama, TKI belum dapat menikmati hasil kerjanya karena harus dipotong utang kepada pihak-pihak yang telah disebutkan tadi.

AKTOR-AKTOR YANG TERLIBAT DAN PERAN MEREKA DALAM PROSES PENGIRIMAN TKI

Pengiriman TKI layaknya sebuah lingkaran yang tak berujung. Banyak pihak yang terkait di dalamnya, mulai dari keluarga (istri/suami dan orang tua) yang mengizinkan anggota keluarganya untuk menjadi TKI, tekong, aparat desa, perusahaan pengirim, dan aparat birokrasi baik di tingkat lokal hingga nasional. Dengan demikian, seorang individu calon TKI secara tidak langsung telah melibatkan dirinya di dalam lingkaran tersebut.

Salah satu karakteristik TKI asal Lombok pada umumnya dan Lombok Timur khususnya adalah jaringan sosial yang terbentuk diantara sesama TKI yang berasal dari daerah yang sama. Haris (2002: 68-85) mengatakan bahwa selain umur, tingkat pendidikan, status perkawinan dan status kepemilikan lahan sebagai karakteristik umum orang Sasak⁷ yang menjadi TKI di Malaysia, jaringan sosial yang terbentuk dalam proses migrasi juga menjadi karakteristik yang ditemui dalam komunitas TKI asal Lombok. Jaringan tersebut dalam analisa Haris memiliki peran yang cukup besar, terutama dalam penyampaian informasi dan biro penyalur⁸ tenaga kerja, yang dalam arti lebih luas sebagai mediator sekaligus *supplier*.

Berdasarkan hasil penelitian di dua desa di Lombok Timur, diperoleh data bahwa sebagian besar orang yang berminat untuk menjadi TKI, terutama ke Malaysia, lebih mempercayakan 'nasib'nya kepada orang yang telah berpengalaman mengirimkan tenaga kerja, atau yang dikenal dengan *tekong*/Petugas Lapangan (PL). Seperti dua orang tokoh masyarakat (tuan guru dan kepala dusun) yang telah berpengalaman menjadi pengirim TKI (*tekong*/PL) ke Malaysia berargumen bahwa hal yang mereka lakukan bertujuan untuk membantu warga desa mencari solusi atas permasalahan ekonomi yang menghimpit mereka. Di satu sisi, hal itu cukup masuk akal mengingat lapangan pekerjaan yang tersedia di desa cukup terbatas sementara jumlah usia produktif yang membutuhkan pekerjaan cenderung naik setiap tahunnya.

Dalam proses tersebut, seorang *tekong* tidak hanya berperan sebagai penyalur tetapi juga sebagai pelindung bagi TKI yang dibawa dari desanya. Hal ini terungkap dalam wawancara dengan Bapak Hardi (50 tahun), seorang kepala dusun di desa Pengadangan. Menurut pengalamannya selama kurang lebih 20 tahun menyalurkan TKI ke Malaysia (terutama Johor Baru), banyak sekali masalah yang dihadapi oleh TKI di negara tempatnya bekerja, diantaranya gaji yang terlambat dibayarkan. Ia mengatakan meskipun *tekong* tidak bertanggung jawab atas hal tersebut (karena tidak ada perjanjian secara tertulis antara *tekong* dengan TKI) namun keselamatan dan kesejahteraan setiap TKI yang dibawanya merupakan tanggung jawab moral yang tidak bisa ia abaikan. Dari hasil wawancara dan pengamatan penulis di lapangan, hampir seluruh *tekong* mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan semata-mata untuk membantu warga desanya dari himpitan kemiskinan. Namun mereka mengakui bahwa saat ini pengiriman TKI secara terus-menerus masih merupakan satu-satunya solusi atas permasalahan tersebut terkecuali apabila daerah mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi mereka yang tidak berkeahlian.

Selain keluarga dan *tekong*, aparat desa juga terlibat dalam proses pengiriman TKI. Beberapa desa di Lombok Timur mulai diberdayakan untuk membuat Peraturan Desa (Perdes) yang berisikan hal-hal penting berkaitan dengan persyaratan, sosialisasi, dan peran pemerintah desa. Dengan kata lain, desa diberdayakan sebagai institusi yang berbadan hukum dalam proses awal perekrutan seorang calon TKI. Selain itu, dengan adanya perdes, perekrutan secara ilegal akan semakin diminimalisir karena seluruh informasi yang datang dari pihak-pihak yang ingin melakukan perekrutan warga desa diatur dalam Tata Cara Perekrutan.⁹ Dengan demikian, aparat desa bertanggung jawab dalam proses keluar dan masuknya setiap warga desa. Kepala desa tidak hanya memfasilitasi pembuatan dokumen-dokumen yang dibutuhkan sebagai syarat administrasi tetapi juga harus selalu memonitor jumlah warga yang keluar dari desa dan yang kembali ke desa.

Pihak lain yang berkontribusi dalam melanggengkan pengiriman TKI adalah perusahaan-perusahaan pengirim (PPTKIS). Undang-Undang No. 39 tahun 2004 pasal 10 menyebutkan bahwa selain pemerintah, Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) menjadi pelaksana penempatan TKI di luar negeri. Perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib mendapat izin tertulis berupa SIPPTKI dari Menteri.¹⁰ PPTKIS bekerja sama dengan BNP2TKI dalam melakukan kegiatan pra-penempatan TKI di luar negeri, yang meliputi: pengurusan Surat Ijin Penempatan (SIP), Perekrutan dan seleksi,

⁹ Etnis mayoritas di Lombok sehingga orang Lombok identik dengan suku Sasak.

¹⁰ Dalam pengerahan tenaga kerja ke luar negeri peran biro atau calo cukup besar dan mereka telah membangun jaringan yang kuat. Meskipun diakui penting, peran calo tidak selalu menguntungkan karena calo menciptakan ketergantungan dan tenaga kerja yang disalurkan menghadapi resiko terhadap kemungkinan tereksplorasi (Pigay 2005: 141).

Pendidikan dan pelatihan, Pemeriksaan kesehatan dan psikologi, pengurusan dokumen, uji kompetensi, pembekelan akhir pemberangkatan (PAP) dan pemberangkatan.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 61. Tahun 2006¹¹ dibentuklah Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang secara yuridis bertanggung jawab untuk melaksanakan UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Badan ini dibentuk sebagai upaya Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengeluarkan kebijakan pada bulan Mei 2005 untuk melindungi keluarga para TKI dari pelanggaran oknum-oknum di Terminal 3 (jalur kedatangan). Badan ini bertugas menempatkan TKI berdasarkan kesepakatan antara pemerintah di negara pengirim dan penerima. Secara khusus, badan ini bertugas untuk memberikan pendampingan, melakukan koordinasi, dan pengawasan terhadap kelengkapan dokumen. Selain itu badan ini juga berkewajiban memberikan solusi terhadap permasalahan, keuangan, pengiriman dan pemulangan, meningkatkan kualitas TKI, menyediakan informasi, kualitas penempatan, dan meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya (Tjiptoherijantodan Harmadi 2008: 11).

Dalam pemberian pelatihan pra-penempatan, BNP2TKI bekerja sama dengan PPTKIS dan bertugas menyiapkan materi pembekalan yang mencakup pembinaan mental kerohanian, pembinaan fisik, disiplin dan kepribadian, sosial budaya, adat istiadat dan kondisi negara tujuan, peraturan perundangan di negara tujuan, tata cara keberangkatan dan kepulangan, informasi yang berkaitan dengan keberadaan Perwakilan RI. Selain itu, ada pula program pengiriman uang (*remittance*) dan tabungan, kelengkapan dokumen TKI, isi perjanjian penempatan, dan hak dan kewajiban TKI/PPTKIS.

Di tingkat lokal sendiri, Pemerintah Daerah (pemda) tingkat provinsi pun memiliki andil yang besar dalam mendorong pengiriman TKI ke luar negeri. Seperti dilaporkan Media Indonesia online¹² bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) menargetkan penempatan 55 ribu orang tenaga kerja Indonesia (TKI) di berbagai negara guna mengatasi persoalan terbatasnya lapangan pekerjaan di daerah ini (<http://www.indonesia.go.id>). Hal ini diperkuat dengan pernyataan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB yang merasa optimis hal itu dapat terwujud mengingat tingginya animo masyarakat NTB untuk bekerja di Malaysia dan Arab Saudi. Dengan demikian, pengiriman TKI ke luar negeri akan tetap dianggap sebagai solusi paling cepat dan mudah untuk menyelesaikan masalah pengangguran dan kemiskinan di negeri ini.

⁹ Bab III Peraturan Desa Pengadangan mengatur tentang Tata Cara Perekrutan. Bab ini terdiri dari 4 bab yang berisi persyaratan administrasi/dokumen yang harus dimiliki oleh individu atau lembaga yang akan merekrut calon TKI dan ketentuan bahwa segala informasi harus disosialisasikan kepada calon TKI dan diketahui serta disetujui oleh pemerintah desa.

¹⁰ Tercantum dalam pasal 12

BERHASIL VERSUS GAGAL? PERTARUNGAN YANG TAK PERNAH BERAKHIR

Aliran *Remittance* ke Daerah

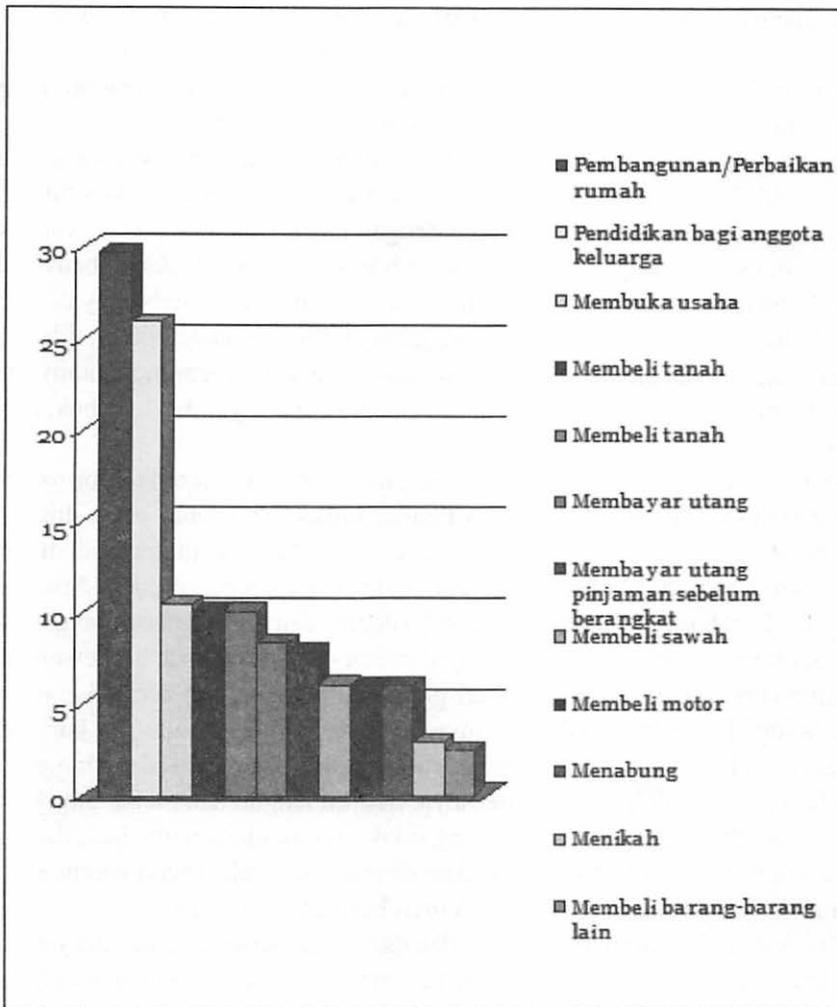
Salah satu ukuran keberhasilan TKI bekerja di luar negeri adalah jumlah *remittance* yang dibawa ke kampung halamannya. *Remittance* yang dibawa TKI dari luar negeri tidak selalu terwujud dalam bentuk uang tetapi bisa berbentuk barang-barang konsumsi (seperti elektronik atau alat-alat olah raga) bahkan pengetahuan dan wawasan yang diperoleh TKI selama bekerja di luar negeri. Hasil pengamatan penulis selama melakukan penelitian lapangan menunjukkan bahwa tidak sedikit TKI atau mantan TKI yang membeli alat-alat olah raga (misalnya raket bulu tangkis), barang-barang elektronik atau telepon genggam tipe terbaru di negara tempat mereka bekerja. Barang-barang tersebut kemudian dibawa begitu mereka pulang ke desa tetapi apabila mereka membutuhkan uang, barang-barang tersebut dijual dengan harga murah.

Selain barang-barang konsumsi, *remittance* yang dibawa oleh TKI dapat berupa pengetahuan atau wawasan mengenai gaya hidup. Hal ini juga sempat teramati oleh peneliti selama penelitian berlangsung. Gaya berpakaian dan gaya bicara para TKI atau mantan TKI terutama yang bekerja di Malaysia terlihat cukup mencolok. Dalam satu kesempatan wawancara dengan Ibu Marni (36 tahun) yang telah bekerja sebagai pengasuh anak di Johor Baru, Malaysia, terlihat bahwa informan cukup nyaman menggunakan logat bahasa Melayu. Meskipun tidak digunakan setiap kali berkomunikasi dengan anggota keluarga atau tetangga, Ibu Marni mengakui sulit menghilangkan kebiasaan tersebut, terlebih lagi dalam waktu dekat dia berencana untuk kembali ke Malaysia untuk bekerja.

Selama penelitian lapangan, penulis mengamati bahwa *remittance* (uang kiriman) hasil jerih payah selama bekerja di luar negeri lebih banyak dimanfaatkan oleh TKI dan keluarganya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari. Setelah itu terpenuhi, *remittance* banyak digunakan untuk membangun atau memperbaiki bangunan rumah. Hampir seluruh informan yang anggota keluarganya menjadi TKI mengakui bahwa *remittance* yang dikirimkan juga untuk membayar utang pinjaman sebelum yang bersangkutan berangkat. Seperti yang digambarkan dalam laporan International Organization for Migration (IOM) Indonesia tahun 2009 pada grafik berikut:

¹¹ Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur sendiri merespon kebijakan Perpres No.61 Tahun 2006 dengan mengeluarkan Perda No. 12 Tahun 2006.

¹² http://www.mediaindonesia.com/index.php?ar_id=NjE2MTO=. Tanggal 20 Februari 2009. Diakses pada tanggal 3 Februari 2010.



Grafik 7. Pemanfaatan Uang Kiriman oleh TKI dan keluarganya

Sumber: International Organization for Migration (IOM) Indonesia. 2009. www.iom.or.id/project/eng/updates/MDU/IndonesiaRemittance.pdf. Diakses tanggal 3 Februari 2010.

Munculnya Fenomena *JaMal* dan *DuRab*

Namun kepergian seorang kepala rumah tangga ke luar negeri untuk menjadi TKI tidak selalu berdampak positif. Masuknya uang kiriman -sebagai hasil kerja keras di negeri orang- ke dalam rumah tangga diklaim sebagai salah satu manfaat dari pengiriman TKI yang terus-menerus itu. Tetapi perginya seorang suami/istri untuk bekerja di luar negeri juga berdampak negatif bagi keluarganya. Di Desa Pengadangan

dan Labuhan Lombok misalnya, istri-istri dan suami-suami yang pasangannya menjadi TKI/TKW, menyangg status baru yang terkenal dengan *jamal* dan *durab*. Istilah ini mungkin juga digunakan oleh masyarakat di luar desa-desa tersebut tetapi bagi peneliti sendiri, istilah-istilah tersebut merupakan hal yang baru.

Jamal atau janda Malaysia adalah sebutan bagi seorang istri yang suaminya pergi menjadi TKI ke Malaysia. Status janda yang disandanginya akan hilang ketika suaminya kembali ke desa. Begitu pula dengan *durab* atau duda Arab, yaitu sebutan bagi para pria/suami yang istrinya menjadi TKW ke Arab Saudi. *Jamal* banyak ditemui di desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela sedangkan *durab* banyak ditemui di desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya. Meskipun demikian, tidak satu pun informan dapat memastikan sejak kapan dan siapa yang memunculkannya pertama kali tetapi istilah-istilah tersebut sudah sangat akrab di masyarakat Lombok, khususnya Lombok Timur.

Menyangg status baru sebagai *jamal*, menurut salah seorang informan bernama Ibu Khofifah (34 tahun), warga desa Pengadangan, jauh lebih berat dibandingkan status *durab* yang disandang laki-laki. Menurutnya, beban berat tersebut dikarenakan pengawasan sosial masyarakat yang lebih ketat terhadap perempuan. Apalagi dalam masyarakat Lombok (etnis Sasak), nilai-nilai agama dan budaya masih sangat dijunjung tinggi. Seorang perempuan yang ditinggal suami -seperti dirinya, berkewajiban untuk selalu menjaga diri agar terhindar dari gunjingan warga yang kemudian melahirkan fitnah. Ia juga bercerita, sejak suaminya ke Malaysia, ia dan ibu-ibu lain yang juga ditinggal suami mereka, merasa bahwa setiap gerak-gerik dan perilaku mereka seolah-olah selalu diawasi oleh warga di desanya. Sedikit lengah dan melakukan kesalahan, mereka akan dianggap sebagai istri yang tidak bisa menjaga nama baik dan martabat suami dan keluarga. Sanksi sosial ini akan dirasakan semakin berat karena sang suami berada jauh dari mereka dan tidak bisa memberikan pembelaan.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan tersebut, para istri yang menjadi *jamal* kemudian lebih memfokuskan kegiatannya pada urusan domestik, seperti mengurus rumah tangga dan anak-anak. Bagi yang memiliki ketrampilan seperti menjahit atau yang menyimpan sedikit modal, akan memanfaatkannya untuk menjual jasa atau membuka warung. Sedangkan bagi mereka yang merasa kebutuhan keluarganya masih harus ditambah karena tidak bisa selalu mengandalkan uang kiriman suami yang tidak menentu, lebih memanfaatkan tawaran untuk bekerja sebagai buruh tani atau buruh batu seperti gambar di bawah ini:



Gambar 3.1. Pekerja Wanita di Tambang Batu

Sumber: Penelitian Lapangan tanggal 25 Juni 2009

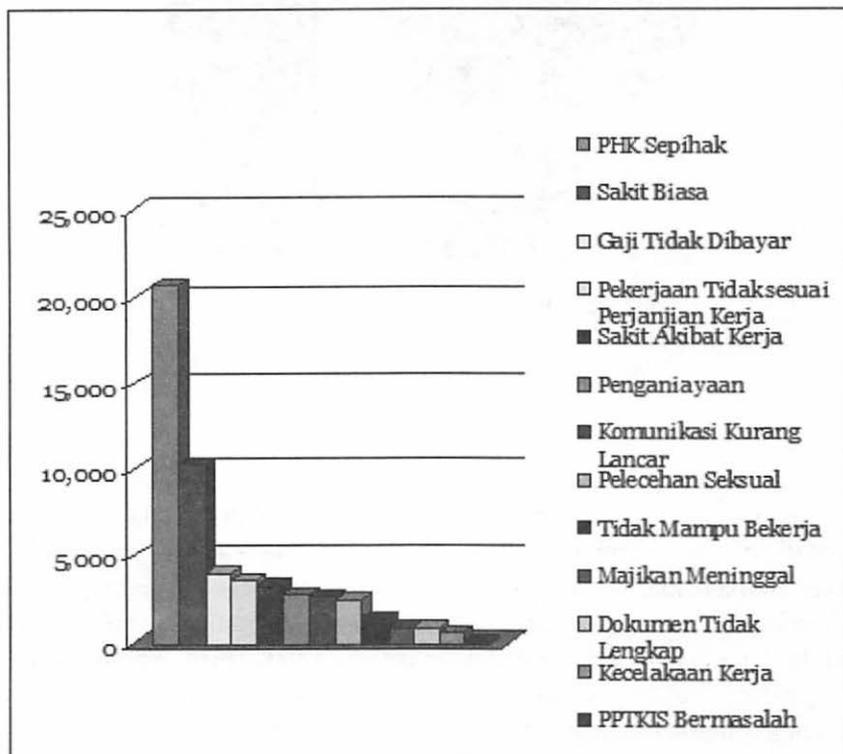
Lain cerita dengan para *durab* di desa Labuhan Lombok, yang tidak seluruhnya memanfaatkan uang kiriman jerih payah istrinya bekerja sebagai TKW, dengan bijaksana. Berdasarkan pengakuan salah seorang anggota keluarga yang bersedia menjadi informan, ada juga suami-suami yang memanfaatkan uang kiriman untuk menikah lagi, tentu saja tanpa sepengetahuan dan ijin istrinya. Namun tidak sedikit pula yang menggunakannya untuk hal yang positif, misalnya membuka warung atau membeli motor untuk mengojek. Dari hasil mengojek atau warung, kebutuhan makan dan semua biaya (sekolah anak, listrik dan lain-lain) dapat dipenuhi sambil menunggu kiriman selanjutnya.

Menjadi *jamal* atau *durab* bukanlah hal yang diharapkan oleh setiap individu. Terlebih lagi dengan beban sosial yang harus ditanggung oleh individu yang bersangkutan. Informan-informan yang menjadi *jamal* atau *durab* pada dasarnya sama-sama merasa kehilangan orang yang dikasihinya namun lagi-lagi sepertinya mereka tidak punya pilihan karena kebutuhan ekonomi yang sangat mendesak. Upaya untuk memperbaiki taraf hidup keluarga ternyata mengharuskan mereka berkorban. Dengan demikian, bukan hanya individu yang bekerja sebagai TKI/TKW yang berkorban tetapi juga orang-orang terdekat yaitu istri/suami dan anak-anak mereka.

Permasalahan Lain yang Harus Dihadapi TKI

Perjuangan dan pengorbanan TKI seakan tidak pernah berakhir. Sudjana (2009) dalam bukunya mengungkapkan bahwa TKI selalu berada pada posisi yang tidak menguntungkan karena hubungan yang tidak seimbang dengan pihak-pihak yang

mempekerjakan mereka. Kondisi inilah yang kemudian mengakibatkan TKI kerap kali mengalami berbagai perlakuan yang tidak manusiawi. Pada tahun 2006 misalnya, BNP2TKI berhasil mencatat berbagai permasalahan yang dihadapi TKI seperti digambarkan pada tabel berikut:



Grafik 6. Permasalahan TKI yang Tercatat Melalui Bandara Soekarno Hatta Tahun 2006

Sumber: Sudjana (2009: 113) mengutip BNP2TKI

Sekalipun telah banyak diberitakan dalam media massa (cetak maupun elektronik) bahwa nasib banyak TKI yang bekerja di luar negeri tidak luput dari permasalahan-permasalahan pelik yang tidak kunjung selesai dan hampir di semua kasus yang diangkat, posisi TKI lebih dirugikan. Sangat masuk akal karena di hampir semua tulisan mengenai TKI, karakteristik yang mencolok adalah rendahnya tingkat pendidikan, minimnya pengetahuan bahasa dan budaya negara yang menjadi tempatnya bekerja dan tanpa keahlian khusus. Faktor-faktor ini yang menurut Sudjana (2009: 115) menempatkan TKI pada sektor-sektor pekerjaan kasar (bukan ahli), yang memerlukan persyaratan manual, mencakup pembantu rumah tangga atau berbasis domestik lainnya. Tingkat pendidikan jelas sangat berpengaruh terhadap jenis pekerjaan yang diambil dan yang terpenting adalah pada posisi tawar yang tidak menguntungkan TKI itu sendiri.

Dalam UU No. 14 Tahun 1969 yang diperbarui menjadi UU No. 25 Tahun 1997, tertulis dengan jelas bahwa pemerintah berkewajiban untuk melindungi dan meningkatkan kualitas TKI melalui pemberdayaan dan perlindungan TKI sebelum, selama dan setelah tidak lagi bekerja di luar negeri. Secara umum, kedua regulasi tersebut memiliki idealisme yang tinggi dalam upaya meningkatkan kualitas TKI yang dikirimkan ke luar negeri meskipun belum secara jelas memasukkan program yang tepat bagi TKI setelah tidak lagi bekerja di luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan TKI belum sampai pada tahap purna kerja. Padahal kenyataannya, TKI memberikan kontribusi ketiga terbesar bagi devisa negara namun tidak ada jaminan bagi setiap TKI yang tidak lagi bekerja di luar negeri untuk tetap produktif di daerah asalnya. Dengan demikian, pengiriman TKI akan terus terjadi, selama ada permintaan dari luar negeri (Muins 2002: 54-121).

PENUTUP

Hasil penelitian di kedua desa di Lombok Timur menunjukkan trend yang cukup menarik. Pertama, tingkat upah yang lebih tinggi di negara tetangga menjadi faktor penarik yang kuat bagi seseorang untuk menjadi TKI. Kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa sebagian besar mereka yang memutuskan untuk mengadu nasib di negeri orang memiliki pekerjaan di desanya namun keinginan untuk mendapatkan penghasilan lebih besar membuat mereka berani mengambil resiko untuk menjadi TKI. Kedua, seperti halnya daerah-daerah lain di Indonesia, TKI yang dikirimkan ke luar negeri mayoritas berpendidikan rendah. Hal inilah yang menyebabkan posisi tawar para TKI diluar negeri rendah.

Ketiga, dari segi usia, TKI yang pergi ke luar negeri adalah orang-orang usia produktif sehingga apabila masih ada kesempatan, mereka bisa lebih dari 3 kali pulang pergi menjadi TKI. Keempat, negara tujuan para TKI dari Lombok Timur adalah Malaysia dan Arab Saudi karena jaringan yang telah terbentuk dan kemudahan dalam persyaratan. Kelima, berdasarkan data survey, hampir seluruh calon TKI menggunakan cara yang instan untuk bisa pergi ke luar negeri, yaitu dengan meminjam uang (dari beberapa sumber) atau menggadaikan ternak. Meskipun hal itu menyebabkan mereka terjerat utang tetapi secara budaya, hal itu dianggap wajar karena dari hasil bekerja di luar negeri, mereka yakin dapat melunasi utang tersebut.

Pengiriman TKI juga berdampak terhadap perekonomian dan kehidupan sosial-budaya masyarakat. Seperti halnya daerah-daerah lain di Indonesia bahkan kawasan-kawasan di seluruh dunia, dampak yang nyata dari proses pengiriman TKI adalah masuknya *remittance* ke negara asal atau khususnya desa tempat keluarganya tinggal. *Remittance* yang dibawa tidak selalu berbentuk uang/materi tetapi bisa berupa pengetahuan, wawasan atau pengalaman kerja yang tentu sangat bermanfaat bagi individu yang bersangkutan. *Remittance* (dalam bentuk uang) biasanya dikirimkan oleh TKI melalui berbagai cara, seperti bank, western union, dititipkan kepada teman/kerabat, dan lain-lain. Setelah sampai ke tujuan, uang tersebut dimanfaatkan oleh anggota

keluarga untuk kebutuhan sehari-hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar informan memanfaatkan uang kiriman tersebut untuk membangun/merenovasi rumah. Rumah menjadi kebutuhan primer yang harus dipenuhi dan menjadi cita-cita hampir setiap TKI dari Lombok Timur.

Harus diakui bahwa pengiriman TKI memberikan dampak positif bagi keluarga dan TKI itu sendiri namun bukan berarti tidak memberikan dampak negatif. Beberapa tulisan mengenai fenomena pengiriman TKI berhasil mengeksplor beberapa dampak negatif dari proses tersebut. Hasil wawancara menunjukkan bahwa di desa Pengadangan muncul stigma jama dan di desa Labuhan Lombok muncul stigma durab. Kedua sebutan ini memiliki konsekuensi yang cukup berat bagi individu yang bersangkutan. Terlebih lagi beberapa informan di desa Labuhan Lombok mengatakan bahwa tidak sedikit para durab yang menyalahgunakan uang yang dikirimkan oleh istrinya. Uang yang seharusnya dimanfaatkan untuk anak-anak dan kebutuhan rumah tangga malah digunakan untuk menikah lagi. Selain itu, perginya seorang suami/istri untuk menjadi TKI juga menyebabkan tingkat perceraian yang cukup tinggi (meskipun tidak ditemukan di 2 desa penelitian).

Selain berdampak terhadap kehidupan sosial-ekonomi keluarga, keputusan untuk menjadi TKI juga memiliki beberapa konsekuensi bagi individu yang menjalaninya. Berita-berita yang diekspos oleh media mengenai TKI sebagian besar terkait dengan masalah perlindungan di negara tempat TKI bekerja. Meskipun berdasarkan data BNP2TKI tahun 2006 menunjukkan bahwa PHK sepihak adalah masalah yang paling banyak terjadi namun penganiayaan dan tidak dibayarkannya gaji menjadi masalah yang paling banyak disoroti oleh media di tanah air. Perlindungan TKI adalah tanggung jawab semua pihak yang terkait dalam proses pengiriman, tidak hanya pemerintah pusat tetapi juga BNP2TKI, Depnakertrans, PPTKIS, pemerintah daerah bakna keluarga dan TKI itu sendiri.

Dengan demikian, yang terpenting adalah membangun komitmen antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengiriman, penempatan hingga purna kerja TKI. Prasetyohadi (2008: 122-126) menyebutkan ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam hubungan antar pihak-pihak terkait, yaitu:

- a). Hubungan antar dan antara PPTKIS dan pemerintah dalam mengurus program bekerja di luar negeri.
- b). Hubungan antar dan antara badan-badan pemerintah.
- c). Hubungan antar dan antara para TKI/TKI dan pemerintah.
- d). Hubungan antar dan antara para TKI/TKI dan PPTKIS.

Hubungan yang dimaksud adalah keterkaitan antar fungsi yang dijalankan dan kerja sama yang harus dibangun oleh pihak-pihak yang terkait. Keterbatasan pengetahuan dan wawasan TKI mengenai prosedur dan mekanisme yang berlaku seharusnya tidak dimanfaatkan bagi keuntungan pribadi/kelompok. Aparat pemerintah pun seharusnya bekerja sama dengan solid dalam menghadapi dan mengantisipasi segala permasalahan.

Secara ideal pekerjaan rumah yang sangat banyak ini dapat diselesaikan apabila masing-masing pihak secara terbuka mau belajar dan bekerja keras memperbaiki sistem yang telah berjalan selama ini. Seringkali yang terjadi di lapangan, *job desk* antara badan-badan pemerintahan sendiri masih sering tumpang tindih sehingga ketika terjadi permasalahan, baik di negara tujuan ataupun di tanah air, pihak-pihak tersebut hanya saling menyalahkan. Begitu pula yang terjadi pada TKI yang dikirimkan oleh PPTKIS yang tidak bertanggung jawab, seringkali kesulitan meminta perlindungan hukum pada saat menghadapi masalah di negara tujuan. Kurangnya sosialisasi dan pendidikan bagi TKI juga menjadi faktor penyebab sehingga dari tahun ke tahun tidak ada perbaikan yang signifikan bagi posisi tawar TKI.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel:

- Badan Pusat Statistik. 2008. *Statistik Potensi Desa Provinsi Nusa Tenggara Barat (Village Potential Statistics of Province of Nusa Tenggara Barat)*. Kantor Badan Pusat Statistik. Jakarta. Indonesia.
- Bank Indonesia. 2008. Hasil Survei Nasional Pola Remitansi TKI di Nusa Tenggara Barat. Online www.bi.go.id/NR/rdonlyres/A2EC7FBB/Boks1SurveiTKI.pdf. Diakses tanggal 3 Februari 2010.
- International Organization for Migration (IOM) Indonesia. 2009. *Remittances to Indonesia. Migration and Development Unit Fact Sheet*. Online www.iom.or.id/project/eng/updates/MDU/IndonesiaRemittance.pdf. Diakses tanggal 3 Februari 2010.
- Haris, Abdul. 2002. *Memburu Ringgit Membagi Kemiskinan: Fakta di Balik Migrasi Orang Sasak ke Malaysia*. Pustaka Pelajar Offset. Yogyakarta. Indonesia.
- Jannes, Eudes Wawa. 2005. *Ironi Pahlawan Devisa: Kisah Tenaga Kerja Indonesia dalam Laporan Jurnalistik*. PT. Kompas Media Nusantara. Jakarta. Indonesia.
- López-Córdova, Ernesto dan Alexandra Olmedo. 2006. *International Remittances and Development: Existing Evidence, Policies and Recommendations*. Institute for the Integration of Latin America and the Caribbean. Buenos Aires. Argentina.
- Mantra, Ida Bagoes. 1998. *Indonesian Labor Mobility to Malaysia (A Case Study: East Flores, West Lombok, And The Island Of Bawean)*. Artikel ini dipresentasikan pada National Workshop on International Migration, tanggal 9-11 Maret 1998, penyelenggara The Population Studies Center, Universitas Gadjah Mada. Jogjakarta. Indonesia.
- Mas'udah, Siti. 2007. *Migrasi Internasional dan Remittances: Studi tentang Pemanfaatan Remittance di Kalangan Keluarga Eks-TKI di Desa Tanjung, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung*. Master Tesis. Universitas Airlangga. Surabaya. Indonesia.

- Muins, H. Sutan Makmur. 2002. *Studi tentang Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia*. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Direktur Jendral Pembinaan dan Pene,patan Tenaga Kerja Luar Negeri. Jakarta. Indonesia.
- Munir, Rozy. 1988. *Mobilitas TKI ke Sabah*. Pusat Penelitian Pranata Pembangunan Lembaga Penelitian Universitas Indonesia dan Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Jakarta. Indonesia.
- Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Kecamatan Pringgasele Desa Pengadangan. 2009. Peraturan Desa Pengadangan tentang Perlindungan dan Pembinaan Tenaga Kerja Indonesia Asal Desa Pengadangan yang Bekerja di Luar Negeri. Lombok. Nusa Tenggara Barat.
- Perwira, Sapruddin M. 2001. *International and Internal migration in Indonesia*. Paper yang dipresentasikan pada AD Hoc Expert Group Meeting dengan tema "Migration and Development Opportunities and Challenges for Poverty Reduction in the ESCAP Region". Online www.akademika.or.id/arsip/migration.pdf. Diakses tanggal 3 Februari 2010.
- Pigay, Natalis. 2005. *Migrasi Tenaga Kerja Internasional: Sejarah, Fenomena, Masalah dan Solusinya*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. Indonesia.
- Portes, Alejandro. 2007. *Migration, Development, and Segmented Assimilation: A Conceptual Review of the Evidence*. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science* (610: 73-97). Sage Publications. London. UK.
- Schuerkens, Ulrike. 2005. *Transnational Migrations and Social Transformations: A Theoretical Perspective*. *Current Sociology* (53: 535). Sage Publications. London. UK.
- Prasetyohadi, PD. Eko, A.Savitri, dkk. 2008. *Menangani Perbudakan Modern dari Desa: Rancang Bangun Peraturan Daerah Berbasis Perlindungan*. The Institute for Ecosoc Rights and Trade Union Rights Center. Jakarta. Indonesia.
- Saad, Hasballah M. 2005. *Panduan TKI(Tenaga Kerja Indonesia/TKI) di Arab Saudi*. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Jakarta. Indonesia.
- Sapford, David dan Zafiris Tzannatos. 1993. *The Economics of The Labour Market*. The Macmillan Press Ltd. Houndmills. UK.
- Sidel, John T. 2007. *Indonesia: Minorities, Migrant Workers, Refugees, and The New Citizenship Law*. Commissioned by United Nations High Commissioner for Refugees, Status Determination and Protection Information Section (DIPS). A Writenet Report. London. UK.
- Singh, Supriya. 2006. "Towards a Sociology of Money and Family in the Indian Diaspora". *Contributions to Indian Sociology* (40: 375-398). Sage Publications. London. UK.
- Sudjana, Eggi. 2009. *Melepas Ranjau TKI: Strategi Pemberdayaan Buruh Migran*. PT. Wahan Semesta Intermedia. Jakarta. Indonesia.

- The World Bank. 2008. *The Malaysia–Indonesia Remittance Corridor: Making Formal Transfers the Best Option for Women and Undocumented Migrants*. Expanded Summary. Jakarta. Indonesia. www.worldbank.org-INTEAPREGTOPSOCDEV/Resources/Remittance.Corridor.Expanded.Summary.en.pdf. Diakses tanggal 3 Februari 2010
- Tjiptoherijanto, Prijono dan Sonny Harry Harmadi. 2008. *Indonesian Migrant Workers: Analysis of Trend, Issues, Policies, and Proposed Solutions*. “Governance in a Triptych: Environment, Migration, Peace and Order”. Eropa Seminar. Manila. Filipina.
- Tirtosudarmo, Riwanto. 2008. *Buruh Migran, Pemuda dan Gerakan Sosial Kritis di Perkotaan: Advokasi Buruh Migran di Mataram, Lombok dan Transnational Advocacy Networks*. Seminar Akhir Hasi Penelitian Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Jakarta.
- Tirtosudarmo, Riwanto. 2009. *Mobility and Human Development in Indonesia*. Human Development Research Paper. United Nations Development Programme. Online http://hdr.undp.org-en-reports-global-hdr2009-papers-HDRP_2009_19.pdf. Diakses tanggal 3 Februari 2010.
- Undang-Undang No.39 Tahun 2004. UU RI No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Jakarta. <http://www.portalhr.com/gudang/regulasi/UU/UU/No%2039%20Tahun%202004%20Tentang%20Penempatan%20dan%20Perlindungan%20TKI.pdf>. Diakses tanggal 4 Februari 2010.
- Wahyuningrum dan Anna Puspita. *West Nusa Tenggara dalam Provincial Assessment. Trafficking of Women and Children in Indonesia*. Online www.solidaritycenter.org/files-IndoTraffickingAssessment.pdf. Diakses tanggal 3 Februari 2010.
- Widhya, Hans Suta. 2010. *Pengiriman TKI Diperketat, Perusahaan Swasta Gigit Jari*. Online <http://bataviase.co.id/node/46610>. Diakses tanggal 3 Februari 2010.
- Williams, Allan M., Vladimir Balá• and Claire Wallace. 2004. “International Labour Mobility and Uneven Regional Development in Europe: Human Capital, Knowledge and Entrepreneurship”. *European Urban and Regional Studies* (11: 27). Sage Publications. London. UK.

Media Massa online:

- Media Indonesia. 2009. NTB Targetkan Penempatan 55 ribu TKI. http://www.mediaindonesia.com/index.php?ar_id=NjE2MTQ dalam http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=9403&Itemid=1254. Diakses tanggal 3 Februari 2010.